BAB IV

KERJASAMA UN WOMEN DENGAN BERBAGAI PIHAK TERKAIT PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI MESIR

Mengingat dunia internasional saat ini selalu berupaya untuk menangani masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, disinilah tidak terkecuali UN Women. Hadirnya UN Women untuk berkontribusi dalam upaya penghapusan diskriminasi perempuan di Mesir didasari bahwa pertama UN Women merupakan organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang berfokus dalam membantu Negara anggota PBB dalam menyelesaikan permasalahan kesetaraan gender , kedua kerangka kerja UN Women juga berdasarkan norma dan standar Internasional PBB yang berkaitan dengan permasalahan diskriminasi perempuan seperti CEDAW dan *Beijing Platform Action*, ketiga Mesir sebagai Negara anggota PBB telah meratifikasi CEDAW tersebut masih belum maksimal dalam mengimplementasikan norma tersebut di negaranya sehingga keadaan diskriminasi perempuan masih terjadi.

A. Inisiasi Awal UN Women di Mesir

Dalam upayanya tersebut UN Women juga harus mampu mengintervensi pemerintah karena pada dasarnya *partner* utama kerjasama dalam upaya ini datang dari pemerintah Mesir sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan Negara Mesir itu sendiri. Dalam membangun kerjasamanya dengan pemerintah dan berbagai pihak di Mesir dalam mewujudkan program-

programnya, UN Women melakukan inisiasi awal dalam suatu kegiatan yang melibatkan pemerintah Mesir itu sendiri dan organisasi lainnya. UN Women mangadakan *roundtable* dengan aktivis dan masyarakat sipil di Kairo membahas peran perempuan dalam mengukir jalan menuju transisi demokrasi. Beroperasinya UN Women pada tahun 2011 secara resmi di berbagai Negara-negara PBB, sejalan dengan adanya momen transisi demokrasi tahun 2011 di Mesir sehingga pembahasan peran perempuan dalam demokrasi baru Mesir dianggap penting untuk menjadi langkah awal perwujudan program UN Women di Mesir. *Roundtable* itu sendiri dipimpin oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon di Mesir pada 19-21 Maret. Direktur Eksekutif UN Women Michelle Bachelet terlibat dengan aktivis perempuan, pemimpin pemuda dan masyarakat sipil dalam pembicaraan interaktif untuk membahas tantangan perempuan di masa depan serta peran praktis dan strategis yang harus dimainkan wanita untuk menentukan jalan bagi demokrasi dan kesetaraan gender di Mesir.

B. Program UN Women di Mesir

Dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Mesir, UN Women menciptakan sebuah rezim kesetaraan gender dengan mengadopsi prinsip *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender. Seperti yang telah diketahui bahwa tidak ada entias tunggal yang akan mencapai kesetaraan gender. Kemajuan nyata membutuhkan kerjasama mobilisasi yang datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti dengan perempuan dan laki-laki, pemerintah dan bisnis, masyarakat sipil dan PBB itu sendiri. Terlebih telah dijelaskan juga bahwa Organisasi Internasional ditujukan untuk membangun kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk

memecahkan persoalan bersama dalam hal ini masalah diskriminasi perempuan di Mesir, maka UN Women juga mengundang kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya penghapusan diskriminasi perempuan di Mesir tersebut. Upaya UN Women tersebut tercakup dalam tiga fokus program sebagai berikut.

B.1 Peningkatan Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan

Jumlah pasrtisipasi perempuan dalam politik baik di tingkat parlemen maupun pemimpin Negara yang tidak signifikan setiap periode atau dari masa ke masa menunjukkan bahwa konstitusi yang menjamin kesetaraan bagi semua warga Negara di Mesir belum mampu mewakili perempuan dalam bidang tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa perempuan kurang terwakili sebagai pemilih dan di posisi terdepan, baik dalam pemerintahan, layanan sipil, sektor swasta atau akademisi. Hal tersebut masih terjadi walaupun mereka terbukti memiliki kemampuan sebagai pemimpin dan agen perubahan, dan memiliki hak untuk berpartisipasi secara sama dalam pemerintahan yang demokratis seperti di Mesir.

Program Peningkatan Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan merupakan program yang diupayakan dalam melakukan intervensi yang komprehensif di bawah strategi UN Women di Mesir dalam menanggapi fase transisi dan pasca transisi dari revolusi 25 Januari 2011. Program tersebut dirancang untuk membantu pemerintah Mesir dalam memenuhi kewajibannya dengan semangat untuk pengarusutamaan gender / *gender mainstreaming* di bawah berbagai deklarasi internasional, serta merespon terhadap tantangan yang dihadapi transisi Mesir menuju demokrasi dimana perempuan

diberdayakan untuk bertindak sebagai warga negara yang sama, dan secara benar terlibat dalam semua tingkat pengambilan keputusan baik di bidang swasta dan publik.

B.1.1. Pembentukan *Egyptian's Women Charter*

Setelah revolusi di Mesir UN Women telah aktif terlibat dalam dukungan langsung untuk koalisi 500 Lembaga Non-Pemerintah (LSM) perempuan. Koalisi dibentuk sebagai tindakan untuk mengawasi proses transisi dan merancang konsensus untuk meluncurkan Piagam Perempuan Mesir atau *Egyptian Women Charter*.[1] *Egyptian Women Charter* diluncurkan pada 4 Juni 2011 di Kairo dalam acara "*Egyptian Women: Partners in the Revolution and in Building Democratic"*. *Egyptian Women Charter* merupakan upaya untuk menyerukan dan memastikan representasi yang adil bagi perempuan di seluruh proses demokratisasi, menegakkan komitmen untuk semua konvensi hak asasi manusia internasional, memperluas pelayanan dasar, terutama untuk perempuan Mesir yang miskin, dan menyelesaikan undang-undang yang diskriminatif.

Egyptian Women Charter merupakan sebuah alat lobi yang kuat dalam mengartikulasikan harapan perempuan akan transisi demokrasi. Proyek ini mempersatukan kelompok yang berbeda untuk membahas tujuan bersama, dan membawa banyak perempuan untuk saling berhubungan dengan alat baru untuk komunikasi dan mobilisasi. Piagam didukung oleh adanya tanda tangan sekitar

[1] UN Women Annual Report 2010-2011. 2011. New York : UN Women. Hal : 11

setengah juta laki-laki dan perempuan Mesir dan diratifikasi oleh 500 LSM perempuan tersebut.[2]

Tuntutan utama dalam piagam tersebut yang berkaitan dengan peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan yaitu :[3]

1. Perempuan harus terwakili dalam panitia yang akan dipercayakan dengan penyusunan konstitusi. Perwakilan semacam itu harus mempertimbangkan jumlah perempuan dalam populasi dan peran masa lalu, sekarang dan masa depan mereka dalam membangun masyarakat.
2. Perempuan juga harus menjadi peserta di semua komite legislatif dan di semua forum dialog yang membahas isu-isu nasional.
3. Wanita harus menempati setidaknya 40 % posisi menteri dan harus berada dalam posisi pengambilan keputusan dan dalam daftar pemilih partai politik.
4. Konstitusi baru harus menguraikan secara jelas kesetaraan penuh antara pria dan wanita di semua bidang kehidupan dan penghapusan segala macam diskriminasi terhadap mereka.
5. Pemilu parlemen harus dijalankan melalui daftar pemilih proporsional yang memiliki setidaknya 30% perempuan.

---

[2] Egypt : Women's Charter Call for Democratic http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/6/egypt-women-s-charter-calls-for-a-democratic-transition diakses 20 April 2017.
[3] Draft Egyptian Women Charter. 2011

6. Seleksi untuk jabatan kepemimpinan dan semua posisi harus didasarkan pada kualifikasi dan persyaratan profesional obyektif dan bukan berdasarkan jenis kelamin.
7. Lulusan perempuan dari sekolah hukum memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh jabatan yudikatif dan mampu melangkah menjadi hakim agar dapat berkontribusi secara efektif dalam peradilan.

B.1.2. Pembentukan *Egyptian's Women Union*

Pada tahun 2011, UN Women juga terlibat dalam sebuah pembentukan bersejarah yaitu pembentukan *Egyptian Women's Union* atau Serikat Perempuan Mesir. *Egyptian Women's Union* terdiri dari 500 organisasi wanita non-pemerintah (LSM). Melalui jaringan, lobi dan dukungan teknis *Egyptian Women's Union* akan fokus dalam memobilisasi lima juta pemilih perempuan dalam pemilihan parlemen dan presiden yang akan datang, dan referendum konstitusional. Ini juga akan mendukung perubahan agenda partai untuk memasukkan perempuan dalam partai tersebut.[4]

B.1.3. Advokasi Hak-hak Perempuan dalam Amandemen Konstitusi Mesir

Langkah tersebut tercermin pada masa transisi pemerintahan Mesir pasca Revolusi Mesir 2011 dimana UN Women bekerja sama dengan *Egyptian Center for Women's Right* mengadakan acara *roundtable* pada 2 Desember 2012 di

[4]On The First Year Anniversary of The Arab Spring, Egyptian Women Continue to call for real change and oppurtunities to shape the Future. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/2/on-the-first-year-anniversary-of-the-arab-spring-egyptian-women-continue-to-call-for-real-change-an diakses 21 April 2017.

Pyramisa Hotel dalam rangka pembentukan *draft* konstitusi baru Mesir yang diikuti juga oleh 97 peserta dari berbagai macam organisasi .[5]

B.1.4. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk (KTP) bagi Wanita Mesir

Satu tahun setelah Revolusi 2011, UN Women bersama *the United Nations Development Programme, the Egyptian Ministry of State for Administrative Development* (MSAD), *the Ministry of* the *Civil Status Registry and the Interior*, the *Social Fund for Development* dan sejumlah aktor masyarakat sipil serta badan nasional menciptakan program untuk mendaftarkan dan menerbitkan 2 juta kartu identitas (KTP) untuk wanita pedesaan dan terpinggirkan di seluruh Mesir dalam jangka waktu tiga tahun. [6]Usaha tersebut merupakan salah satu usaha bersama UN Women dalam bagian dari "*Women Citizenship Initiative*". Inisiatif tersebut berencana untuk menerbitkan dua juta kartu identitas yang memungkinkan perempuan miskin, cacat dan mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpinggirkan memiliki dampak pada proses politik sebagai pemilih. Mengingat bahwa empat juta wanita di Mesir tidak memiliki KTP sehingga perempuan tersebut tidak berhak mengakses layanan keuangan seperti kredit dan pinjaman, pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan sosial lainnya yang disediakan oleh Pemerintah. Hak politik mereka seperti memilih

---

[5] A Round-table's Report Women's Situation in The New Draft of The Constitution. 2 Desember 2012 dalam http://ecwronline.org/?p=1442 diakses 20 April 2017

[6] The Women Citizenship Iniatitive will ensure Citizenship Right to two million women in Egypt. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/7/the-women-citizenship-initiative-will-ensure-citizenship-rights-to-two-million-women-in-egypt diakses 21 April 2017.

atau bergabung dalam partai politik juga terbatas. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan meningkatkan posisi ekonomi mereka. Tahap pertama inisiatif ini yaitu proses registrasi, dimulai pada bulan April 2012 di Qalioubiah, sebuah provinsi yang berada di wilayah Delta Nil, *Lower Egypt*. Pada bulan Juli, 300 KTP nasional dikeluarkan. Sebanyak empat puluh ribu ID akan dikeluarkan untuk wanita di Qalioubiah sebagai bagian dari fase pertama ini.

B.1.5. Penciptaan Pemilu Sadar Gender

Koalisi untuk Pendidikan Kewarganegaraan dan Partisipasi Perempuan juga telah dibentuk untuk memantau partisipasi politik perempuan selama masa transisi, dimana anggota UN Women menjadi pengawas dan pelobi. UN Women mendukung Mesir untuk meningkatkan kepemimpinan politik perempuan, termasuk reformasi konstitusi dan langkah-langkah khusus sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi politik. Ini membantu menyediakan wanita dengan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sebagai calon dan politisi yang efektif, dan memastikan bahwa manajemen pemilu merespon kepentingan perempuan. UN Women membantu para pemangku kepentingan nasional untuk mengelola pemilu sadar gender, apakah itu berarti memastikan semua wanita bisa mencapai kotak suara atau melindungi calon perempuan dari kekerasan pemilu.

Berbagai sesi pelatihan, lokakarya dan informasi telah memberikan kesadaran politik di kalangan wanita negara tersebut. Bermitra dengan institusi seperti Universitas Kairo, misalnya, UN Women telah membantu merekrut

pengamat pemilihan perempuan dan mengadakan sesi pelatihan untuk kandidat perempuan dan manajer kampanye mereka.[7] Dalam kasus lain, kampanye kesadaran pemilih ditargetkan pada wanita dan dikembangkan melalui media dengan menggunakan Layanan Publik, dan jingle di radio dan televisi.

Dalam inisiatif lain UN Women bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan *Egyptian High Judicial Elections Committee* mengampanyekan peningkatan pemilih perempuan dalam pemilihan umum 2011 melalui pengumuman dan jingle.[8] Pengumuman layanan publik muncul di layar televisi Mesir sepanjang pemilihan parlemen pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012. Pengumuman tersebut mendesak pemirsa untuk mengingat bahwa jawabannya ada pada mereka. *Voting* adalah cara untuk memutuskan, dan hak dan tanggung jawab baik untuk perempuan maupun pria. Di stasiun radio, jingle yang mudah diingat juga diserukan dengan sebuah permainan dalam bahasa Arab umum dalam mendesak perempuan untuk pergi ke pemungutan suara sehingga Mesir bisa bangkit. Dalam sebuah inisiatif lain dari pelengkap upaya tersebut, UN Women dengan *Egyptian Center Women's Right* mengembangkan sebuah permainan pendidikan pemilih tiga dimensi (3-D) atau *3-D voter education game*. Didistribusikan melalui 100 organisasi masyarakat sipil dan mencapai 30.000 orang hadir dalam sebuah acara keluarga yang popular. [9]

---

[7] On The First Year Anniversary of The Arab Spring, Egyptian Women Continue to call for real change and oppurtunities to shape the Future. Op Cit.
[8] UN Women Annual Report 2011-2012. 2012. New York: UN Women. Hal : 9.
[9] Loc Cit.

Pada tahun 2011, dukungan UN Women dalam peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan di Mesir membawa rekor jumlah perempuan ke tempat pemungutan suara di Mesir dengan peningkatan pemilih perempuan dari 40 % menjadi 46% untuk memperpanjang kehadiran perempuan dalam politik, dan untuk memperkuat suara perempuan dalam urusan kota. Secara global, Majelis Umum PBB sepakat bahwa negara harus mengambil dan melaporkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. [10]

B.2. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Melalui program gabungan PBB *(UN Joint Programme)*, UN Women Mesir memberikan dukungan terhadap pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk menanggapi dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. UN Women berupaya memberikan kontribusi untuk meningkatkan respon terhadap infrastruktur publik berbasis gender yang mencakup langkah-langkah praktis untuk meningkatkan keselamatan bagi perempuan dan anak perempuan.

Selanjutnya, UN Women mendukung pengembangan kapasitas lembaga pemerintah daerah untuk mencegah dan merespons kekerasan seksual dalam koordinasi dengan organisasi perempuan, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan utama lainnya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petugas pemelihara dan penyedia layanan mengenai kekerasan seksual di tempat umum. Dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir, UN Women menciptakan

[10] Loc Cit

suat program besar bernama *"Safe Cities Programme".* Program yang direncanakan akan berlangsung dari tahun 2011-2018 tersebut diluncurkan dengan dukungan dari *United States Agency for International Development* (USAID), Uni Eropa, dan Kerjasama Spanyol / *Spanish Cooperation* (AECID) serta melibatkan kemitraan yang kuat dengan pemerintah Mesir, akar rumput wanita, Lembaga Non-Pemerintah / NGO, UN Habitat, badan-badan PBB lainnya, sektor swasta dan mitra lainnya.[11]

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sebagian besar perempuan Mesir telah menjadi korban dari kekerasan, baik itu pelecehan seksual, kekerasan fisik dan verbal baik di jalanan, transportasi umum dan taman, di dalam dan sekitar sekolah dan tempat kerja, atau di lingkungan mereka sendiri. Kenyataan ini mengurangi kebebasan bergerak perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan kesempatan mereka dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki disaat pria dan anak laki-laki tersebut menikmatinya. Ini mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi di sekolah, dalam pekerjaan formal atau informal, dan dalam kehidupan publik serta membatasi akses mereka terhadap layanan penting, dan menikmati kesempatan budaya dan rekreasi. Hal ini juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Program *"Safe Cities"* atau yang lebih dikenal *"Cairo Safe City"* merupakan salah satu bagian dari prakarsa global UN Women dalam

[11] Egypt .http://arabstates.unwomen.org/en/countries/egypt#sthash.TyZBtsI1.dpuf diakses 21 April 2017.

menciptakan kota aman "*Safe City*" di lebih dari 20 kota di berbagai Negara, tidak terkecuali di Mesir. Aspek yang menentukan dari pendekatan *Safe Cities* adalah memberikan kontribusi signifikan pada salah satu bidang pemrograman strategis yang paling diabaikan, yaitu pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Fokusnya adalah melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dalam konteks Model Kota Aman yang akan diujicobakan di Wilayah Greater Kairo dan juga di daerah perkotaan Giza dan Qalyubiya. Tiga wilayah telah dipilih untuk pelaksanaan program adalah Ezbet EL Haganna, Mansheyat Nasser dan Embaba, sementara tiga tambahan daerah akan digunakan sebagai kelompok kontrol yaitu Al Salam Al Sharkeya, Al Ebagaya dan Boulak El Dakrour.

Tujuan utama *Safe City* adalah untuk menyediakan institusi yang relevan di Mesir dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menanggapi, dan mencegah kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan di tempat umum, sekaligus mengurangi prevalensi kekerasan tersebut dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, program *Safe City* siap memberikan kontribusi yang berharga bagi upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Prinsip utama dari program ini adalah memberdayakan masyarakat miskin melalui kepemimpinan perempuan dan pemuda di tingkat akar rumput. Selain itu, program ini berusaha mencapai dampak transformatif jangka panjang dalam cara pengamanan perkotaan dikonseptualisasikan, bergerak melampaui pencegahan kejahatan ke gagasan toleransi, koeksistensi dan non-diskriminasi yang lebih luas yang berasal dari pemahaman mendalam tentang bagaimana

penggunaan, dan akses ke ruang public yang berkaitan dengan hak, kesetaraan, dan partisipasi warga Negara.

Program ini mendapat dukungan yang cukup baik dari segi lapoisan masyarakat, baik dari pemerintah Mesir itu sendiri maupun dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah (LSM). Hadirnya program *Safe City* memberi inspirasi kepada *Egypt's Ministry of Housing, Utilities and Urban Development* untuk mengadopsi konsep keselamatan dan perlindungan perempuan dalam memandu perencanaan kota.[12] Dalam mendukung program *Safe City* di Mesir juga sejumlah LSM Mesir berkumpul dalam mengkampanyekan kesadaran untuk mengakiri kekerasan terhadap perempuan dengan menjangkau masyarakat melalui media sosial, teater jalanan dan penghargaan pemenang film.[13]

Dalam inisiatif lain, UN Women mengkordinasikan kampanye UNiTE[14] untuk menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan dengan tujuan untuk secara khusus melibatkan kaum Pria muda dalam kampanye tersebut dan meluncurkan Kompetisi Desain baju yang juga mengundang pria berusia 18 - 25 tahun untuk menggunakan imajinasi mereka dalam sebuah desain yang menggambarkan pencagahan dan pengakhiran kekerasan terhadap perempuan.

---

[12] Proceedings Report Safe Cities Global Leader's Forum. Safe Cities For Women and Girls : Implementation Essentials and Key Takeways. 2015. New York: UN Women. Hal : vii

[13] Annual Report UN Women 2012-2013

[14] UNiTe diluncurkan tahun 2008 oleh Sekertaris Jendral PBB dalam rangka mengkampanyekan penolakan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. UNiTE menyerukan kepada pemerintah, masyarakat sipil, organisasi perempuan, pemuda, sektor swasta, media dan seluruh sistem PBB untuk bergabung dalam menangani pandemi kekerasan global terhadap perempuan dan anak perempuan. (http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite) diakses pada 17 April 2017.

Hasilnya hampir 600 desain baju diajukan dan mengundang 300.000 pengunjung dari 195 negara dan teritori untuk mengunjungi situs web tersebut. [15]

Direktur Eksekutif UN Women, Michelle Bachelet pada tahun 2013 menyerukan kepada Pemerintah dan rakyat Mesir untuk bersikap teguh melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan untuk mempromosikan hak asasi manusia untuk semua orang, termasuk hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi dan berpartisipasi secara penuh dalam Sosial, ekonomi dan politik. Hal ini menuntut komitmen pada tingkat kepemimpinan tertinggi di Mesir untuk menerapkan undang-undang dan mekanisme yang menjamin perlindungan perempuan dan kemampuan mereka untuk menjalankan hak-hak mereka.

Pada tahun 2014 untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir membentuk hukum "pelecehan seksual".[16] Hukum ini merupakan langkah besar untuk mencapai keamanan perempuan dan anak perempuan Mesir di ruang publik. Undang-undang ini merupakan hasil konkret dari upaya gabungan oleh Pemerintah Mesir bersama dengan masyarakat sipil dan badan-badan PBB tidak terkecuali UN Women. UN Women di Mesir juga akan melanjutkan upayanya

[15] UN Women Annual Report 2011-2012. Op Cit. Hal : 13.
[16]UN Egypt calls for firm stand on violence against women dalam http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/6/new-anti-sexual-harassment-law-in-egypt#sthash.AsUZZ1EP.dpuf diakses 21 April 2017

untuk mendukung usulan perubahan, prosedur dan peraturan legislatif yang seharusnya berasal dari undang-undang yang baru disetujui untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan dan kehidupan untuk perempuan dan anak perempuan dibuat lebih aman.

B.3. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi terhadap Perempuan

Jumlah partisipasi wanita dalam ketenagakerjaan di Mesir merupakan yang terendah di dunia. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, tenaga kerja perempuan muda usia (18-29) dalam hal ini perempuan di usia angkatan kerja hanya berada dalam angka 22%, sedangkan tenaga kerja laki-laki dalam usia angkatan kerja berada di jumlah yang lebih besar yaitu 75%. Partisipasi ekonomi Wanita Mesir dibatasi oleh norma dan kondisi sosial serta budaya yang membuat mereka lebih miskin, kurang dapat memperoleh manfaat dari penghargaan dan perlindungan pasar tenaga kerja, dan lebih terbebani oleh pekerjaan yang tidak dibayar yang sering terjadi tidak didukung dan tidak terlihat oleh negara dan kebijakan sosialnya.

Pemberdayaan Ekonomi perempuan menetapkan jalan langsung menuju kesetaraan gender, pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Wanita pad dasarnya mampu memberi kontribusi besar pada ekonomi, baik di bisnis, peternakan, sebagai pengusaha atau karyawan, atau dengan melakukan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di rumah. Namun, kesempatan tersebut juga membuat mereka tetap tidak mendapatkan posisi yang proporsional hal tersebut dipengaruhi oleh kemiskinan, diskriminasi dan eksploitasi. Diskriminasi gender berarti perempuan sering berakhir dengan

pekerjaan yang tidak aman dan berupah rendah, dan merupakan minoritas kecil di posisi senior. Ini membatasi akses terhadap aset ekonomi seperti tanah dan pinjaman, juga membatasi partisipasi dalam membentuk kebijakan ekonomi dan sosial. Dikarenakan wanita juga melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, mereka seringkali memiliki sedikit waktu untuk mengejar peluang ekonomi.

Melalui serangkaian program yang bekerja pada tingkat yang berbeda, UN Women Mesir telah menjadi advokat yang kuat untuk menjamin hak dan partisipasi perempuan yang setara dalam sektor ekonomi formal dan informal. UN Women melakukan intervensi yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan paket layanan keuangan dan non-keuangan yang memungkinkan perempuan mendapatkan evaluasi finansial yang tepat atas partisipasi mereka di sektor pertanian. Program ini beroperasi di Mesir Atas *(Upper Egypt*) dan Mesir Bawah *(Lower Egypt*) [17]dengan fokus pada transfer aset, akses terhadap kredit dan skema tabungan yang memungkinkan perempuan untuk (i) mendapat imbalan finansial atas pekerjaan mereka; (ii) memiliki rasa aman ekonomi dan (iii) mendapatkan keterampilan dan mengetahui bagaimana menjalankan bisnis. Program yang dicanangkan oleh UN Women dalam hal ini yaitu:

[17] Mesir Kuno terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Mesir Hulu/ Atas (*Upper Egypt*) dan Mesir Bawah *(Lower Egypt).* Di sebelah utara merupakan *Lower Egypt*, di mana Sungai Nil diregangkan dengan beberapa cabangnya untuk membentuk Delta Sungai Nil. Ke arah selatan adalah *Upper Egypt*, membentang ke Syene. Terminologi "Upper" dan "Lower" berasal dari arus Sungai Nil dari dataran tinggi Afrika Timur ke utara sampai Laut Mediterania, kebalikan dari sungai mengalir ke utara sampai selatan seperti Mississippi, sehingga *Upper Egypt* terletak di selatan Dari Mesir bagian bawah Mesir bagian bawah sebagian besar terdiri dari Delta Sungai Nil dalam
David Wengrow .The Archaeology of Early Egypt: Social transformations in North-East Africa, 10,000 to 2650 B.C., Cambridge University Press, 2006.

B.3.1. Salheya

Departemen Tenaga Kerja Mesir bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sosial Universitas Amerika di Kairo / *Social Research Center of the American University in Cairo*, dan dengan dukungan finansial dan teknis dari UN Women mencanangkan program Salheya. Salheya merupakan program yang memberikan kesempatan untuk penerapan model demonstrasi dan strategi terpadu dalam meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, dan juga untuk meningkatkan proses sertifikasi kesetaraan kesetaraan gender. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran perempuan muda dari pendidikan menengah dan tinggi dalam bidang ekonomi serta meningkatkan keamanan dan hak mereka.

Salheya telah mendorong pembentukan tim khusus di Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan audit gender perusahaan swasta dan publik dimana sebuah sistem sertifikasi dirancang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan terhadap kesetaraan jender. Lima pabrik di Sharkeya mendapatkan keuntungan dari program pengembangan kapasitas untuk mengintegrasikan penjaminan kesetaraan gender di bisnis mereka pada tahun 2015 yang pada akhirnya menerapkan kesetaraan gender dalam sistem manajemen perusahaan.

Program ini melibatkan empat ratus pegawai negeri sipil dari Kementerian Tenaga Kerja melalui dua puluh enam kursus pelatihan untuk menerapkan prinsip pengarusutamaan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja baik di perusahan swasta maupun perusahaan publik tersebut. Empat unit mobil diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengakomodasi permintaan pelatihan

yang meningkat di empat wilayah di Provinsi Sharkeya bersamaan dengan pameran untuk memamerkan produk-produk yang dihasilkan oleh lulusan program tersebut.[18] Unit mobile sangat siap untuk menyediakan pengembangan kapasitas di beberapa bidang untuk meningkatkan kemampuan kerja perempuan yang menjamin keberlanjutan program di luar kerangka waktu hibah *UN Women's Fund for Gender Equality* (FGE) yang telah ditutup.

Program ini juga telah memberikan maanfaat bagi lebih dari 1.300 perempuan untuk meningkatkan keterampilan produktif mereka dari delapan kursus pelatihan kejuruan, sementara 500 lainnya telah menemukan pekerjaan atau mendirikan bisnis mereka sendiri melalui beberapa model kemitraan sektor swasta.[19] Dua gerai permanen diciptakan untuk memasarkan produk mereka oleh Kementerian Tenaga Kerja. Untuk lebih mendukung perempuan dalam memasarkan keterampilan dan produk mereka, program ini juga menciptakan situs web yang sesuai dengan sisi penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja untuk mendukung pekerja wanita dan lulusan program ini. Untuk tujuan yang sama, program ini menciptakan jaringan kemitraan yang konstruktif dengan sepuluh organisasi masyarakat sipil dan tiga belas institusi sektor swasta di wilayah New Salheya, zona industri Ramadan ke-10 dan

[18]Celebrating the conclusion of the "Salheya Initiative for Women Economic Empowerment". 31 Januari 2016 dalam http://arabstates.unwomen.org/en/news/stories/2016/1/salheya#sthash.5S77QMeb.O4tUU9Gi.dpuf diakses 22 April 2017

[19] UN Women Annual Report 2015-2016. 2016. New York : UN Women . Hal : 35

Kairo. Kemitraan juga diperluas untuk mencakup Kementerian Solidaritas Sosial dan Serikat Buruh Sharkeysa.[20]

B.3.2. *Pro-Poor Horticulture Value Chains In Upper Egypt (Salasel)*

Penciptaan program Salasel didasarkan pada sejumlah kenyataan, yang pertama adalah kehadiran dan peran penting perempuan dalam sektor kunci ekonomi Mesir yaitu pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian penduduk Mesir dengan jumlah 55 % yang mempekerjakan 30 % angkatan kerja. Laporan Pembangunan Dunia untuk Kesetaraan dan Pembangunan PBB menunjukkan bahwa 46 % angkatan kerja wanita Mesir dipekerjakan di bidang pertanian[21]. Namun, perempuan memiliki sedikit kontrol atas tanah atau sumber daya produktif, bahkan jika mereka memiliki aset tersebut.

Kondisi kerja perempuan dan keuntungan yang mereka dapatkan dari kerja mereka tidak sepadan dengan peran mereka di tempat kerja atau dengan tanggung jawab mereka di rumah dan di masyarakat. Selanjutnya, meningkatnya fenomena migrasi laki-laki untuk mencari pekerjaan yang menguntungkan telah mengikis peran berbasis gender tradisional di daerah pedesaan. Namun, norma gender tradisional tetap bertahan. Hasilnya adalah

---

[20] "Celebrating the conclusion of the "Salheya Initiative for Women Economic Empowerment". Op Cit.

[21] Advancing gender equality: promising practices (Case Studies from the millennium development goals Achievement Fund), Egypt Gender Mainstreaming Strategy in the Pro-poor Horticulture Value Chain in Upper Egypt (SALASEL)MDG-F Programme. http://www.unwomen.org/mdgf/downloads/MDG-F_Egypt_B.pdf Hal: 92

bahwa perempuan dan anak perempuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik di lingkungan publik maupun swasta.

Realitas kedua adalah disparitas regional dalam pertumbuhan ekonomi Mesir yang mengurangi kemajuan dalam memenuhi *Millenium Development Goals* (MDGs), khususnya MDG 3. Kemiskinan di Mesir, menurut Badan Pusat Mobilisasi dan Statistik Umum, sedang meningkat. Di Mesir Bagian Atas / *Upper Egypt*, kemiskinan meningkat di daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing dari 21,7 persen dan 43,7 persen. Pada tahun 2008-2009 menjadi 29,5 persen dan 51,4 persen pada 2010-2011. Selain itu, peran dan status perempuan yang berbeda dibandingkan laki-laki paling nyata dalam Mesir bagian atas/ *Upper Egypt.*[22]

Dari kondisi itulah pelaksanaan Rantai Nilai Hortikultura Pro-poor atau *Pro-Poor Horticulture Value Chains In Upper Egypt (Salasel)* diciptakan dalam Program Bersama yang dijalankan UN Women dengan berbagai pihak seperti UNDP, UNIDO, ILO, dan juga dengan mitra nasional seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Mesir dan Kementerian Investasi yang didanai oleh MDG Fund sebesar $ 7.5 juta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor hortikultura di Mesir dan memperbaiki kondisi kerja petani kecil dan pekerja pertanian, terutama perempuan, di sepanjang berbagai simpul rantai nilai.

[22] Loc Cit

Kontribusi UN Women dalam hal ini mencakup semua bidang program sambil memusatkan perhatian pada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat petani tentang isu-isu dan ketidakadilan gender. Program tersebut mengadopsi strategi pengarusutamaan gender yang melintasi semua area program, sambil memusatkan perhatian pada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat petani tentang isu ketidakadilan gender; Memobilisasi Komite Perempuan di dalam asosiasi pertanian dan memperkuat kapasitas perempuan yang bekerja di *Post Harvest Center* / Pusat Pasca Panen.

Tujuan pengembangan strategi pengarusutamaan gender dalam program ini adalah untuk memberdayakan perempuan dalam rantai pasokan ekspor dengan memastikan bahwa mereka memberi nilai tambah pada rantai pasokan dengan cara baru dan terukur, dan untuk memastikan bahwa intervensi ini akan menghasilkan perbaikan pada standar kehidupan mereka dan peran mereka dalam keluarga dan lingkungan pedesaan mereka. Untuk mengukur keberhasilan proses pengarusutamaan, lima indikator spesifik didefinisikan sebagai berikut :[23]

- Jumlah Komite Perempuan yang diaktifkan dalam Asosiasi Pertanian (*Farm Association*/FA) yang ditargetkan;
- Jumlah wanita yang dibantu oleh Komite Wanita untuk memulai / meningkatkan bisnis;
- Persen rata-rata peningkatan jumlah wanita yang bergabung dengan FA;

[23] Ibid . Hal : 92-93.

- Persentase penerimaan FA dialokasikan ke Komite Perempuan; dan
- Jumlah wanita yang menerima aset melalui proyek.

Berakhir pada tahun 2013, tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan kemitraan yang layak antara petani kecil dan investor sektor swasta dalam rantai nilai hortikultura yang efisien dan berpihak pada penduduk miskin di 3 lokasi Provinsi Mesir bagian atas (*Upper Egypt)* termiskin. Program ini menargetkan perempuan di daerah Luxor dan Beni Suef, memberikan mereka layanan pengembangan bisnis dan pelatihan pengembangan kewirausahaan terutama pada peternakan termasuk perawatan, reproduksi, makan dan pemeriksaan kesehatan. Program ini mampu membangun 2 perempuan pertama yang memimpin koperasi termasuk 25 wanita di masing-masing provinsi.

Setelah bertahun-tahun terpinggirkan dan mengalami kesulitan, 26 wanita meninggalkan asosiasi dan membentuk koperasi, yang mendorong mereka untuk secara mandiri mulai menanam ternak , sumber penghasilan baru untuk mereka. Koperasi tersebut telah mendapatkan pekerjaan dan kondisi kerja yang layak bagi perempuan-perempuan ini, di dekatnya dan di mana para wanita menjadi pemegang saham dan membuat keputusan mengenai pembagian kerja atau membeli ternak. Koperasi perempuan baru ini adalah bagian dari program Salasel. Dengan mengorganisir kegiatan dalam menghasilkan pendapatan, ini bertujuan untuk memperbaiki posisi petani kecil di pasar ekspor dan domestik dan menciptakan lapangan kerja yang layak dan aman di wilayah ini untuk pria

dan wanita. Melalui kerja sama di koperasi ini, setiap wanita akan memiliki penghasilan bulanan setidaknya 300 sampai 400 pound Mesir. [24]

Mohammad Naciri, Perwakilan UN Women di Mesir menegaskan bahwa memberdayakan perempuan dan mengatasi tantangan negatif yang masih ada adalah prioritas bagi UN Women. Dalam satu tahun, UN Women telah meluncurkan tiga koperasi yang dipimpin perempuan di Mesir Atas (*Upper Egypt)* untuk mendorong masuknya perempuan ke dalam ekonomi dan memajukan kesetaraan gender mengingat bahwa salah satu tujuan UN Women adalah mengedepankan kepemimpinan perempuan dalam ekonomi dan memberi mereka peluang menghasilkan pendapatan riil.

Peluncuran koperasi tersebut dilakukan di kantor gubernur pada bulan Juni 2013, dengan perwakilan dari UN Women, badan PBB dan kementrian yang terlibat dalam program ini (*The Joint Programme*),dan Misr El Kheir Foundation. UN Women dan anggota pendiri telah bekerjasama dengan Misr el Kheir Foundation dalam menyediakan aset yang menghasilkan pendapatan (seperti ternak), pelatihan pengembangan bisnis dan dukungan teknis (seperti pelatihan bagaimana meningkatkan dan merawat ternak).

[24] First women's cooperatives changing lives and lands in Upper Egypt dalam: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/women-cooperatives-in-upper-egypt#sthash.bfdmGTAq.dpuf diakses 22 April 2017